

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang sangat populer, tidak saja di Indonesia tetapi juga mancanegara. Citra dan identitas Bali sebagai daerah tujuan wisata yang indah, agung, eksotis, lestari, dengan perilaku masyarakatnya yang ramah dan bersahaja, ditopang oleh adat istiadat dan budayanya yang mendasarkan pada prinsip keharmonisan dan keseimbangan dengan bertumpu pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah hidup *Tri Hita Karana*. Kedua ajaran ini saling berkaitan, di mana agama Hindu menjiwai falsafah *Tri Hita Karana*, dan sebaliknya falsafah *Tri Hita Karana* mendasarkan pada ajaran agama Hindu.

Pendukung kebudayaan Bali adalah masyarakat Bali, yang dikenal sebagai etnik Bali atau orang Bali. Sebagai sebuah etnik, orang Bali memiliki ciri identitas etnik yang melekat pada diri dan kelompoknya. Dinas Pariwisata Provinsi Bali (2008: 3) mendefinisikan etnik Bali sebagai sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaan, baik kebudayaan lokal Bali maupun kebudayaan nasional. Rasa kesadaran akan kesatuan kebudayaan Bali ini diperkuat oleh adanya kesatuan bahasa, yakni bahasa Bali, agama Hindu, dan kesatuan perjalanan sejarah dan kebudayaanya. Keyakinan terhadap agama Hindu melahirkan berbagai macam tradisi, adat, budaya, kesenian, dan lain sebagainya yang memiliki karakteristik yang khas, yang merupakan perpaduan antara tradisi dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, karakteristik tersebut mewujudkan diri

dalam berbagai konsepsi, aktivitas sosial, maupun karya fisik orang Bali (Supatra 2006; Geriya, 2008).

Identitas etnik orang Bali juga tampak pada busana tradisional Bali dan identitas ruang serta lingkungan tempat tinggal (Supatra, 2006: 88-89). Dalam pengertian ruang dan tempat tinggal, persamaan-persamaan yang menjadi ciri identitas etnik orang Bali mencakup kesamaan sebagai *krama desa* (warga desa) dari suatu *desa pakramanan* (desa adat) dengan berbagai aturan yang mengikatnya, yang termuat dalam *Awig-awig Desa Pakraman* (peraturan tertulis desa adat) (Windia dan Sudantra, 2006; Sirtha, 2005). Disamping hidup sebagai *krama desa* sebuah *desa pakraman*, seluruh masyarakat Bali juga terikat dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang disebut *dadia*, yang jumlah anggotanya bervariasi dan bertempat tinggal menyebar, tidak selalu pada satu teritorial tertentu. Geertz and Geertz (1975) menyebutkan, bahwa *dadia* merupakan basis atau unit terkecil dari kelompok masyarakat adat di Bali yang terdiri dari beberapa *kuren* (keluarga), dan merupakan bagian dari *desa pakraman*. Mereka terikat oleh kesamaan *wit* (asal) berdasarkan kesamaan leluhur, dan terikat pula oleh suatu tempat persembahyangan bersama, yakni *Pura Dadia* (Windia dan Sudantra, 2006: 71).

Dalam kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana*. Falsafah hidup *Tri Hita Karana* sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi pandangan hidup masyarakat Bali, baik dalam mengembangkan sistem

pengetahuan, pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya. Pada akhirnya falsafah *Tri Hita Karana* ini menjadi ideologi dan *core values* (inti ajaran) dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bali. Ideologi dan *core values* inilah yang kemudian menjadi landasan bagi standar peraturan yang digunakan institusi-institusi utama, seperti *kuren* dan *dadia, sekaa* (organisasi tradisional), *subak* (organisasi pengairan) dan *desa pakramanan* di Bali, dalam mengevaluasi perilaku anggotanya.

Implikasi yang lebih luas dari adanya pandangan yang mengandung *core values* tersebut adalah, unsur-unsur dalam struktur sosial yang membangun masyarakat Bali senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Tri Hita Karana* sesuai dengan lingkungan kehidupannya. Pada tataran individu, manusia Bali sebagai bagian dari lingkungan dunia mikrokosmos, meyakini bahwa kehidupan manusia merupakan wujud yang dinamis dari gerak hubungan unsur-unsur *atman* (jiwa), *prana* (tenaga, kekuatan), dan *sarira* (unsur badan kasar) (Kaler, 1983: 13). Sehubungan dengan itu, maka pranata-pranata sosial masyarakat Bali mulai dari yang lebih luas sebagai pencerminan dari lingkungan makrokosmos, maupun unit terkecil sebagai pencerminan lingkungan mikrokosmos, menerapkan pola yang sama dalam menciptakan hubungan harmonis dari ketiga unsur di atas. Hal tersebut melandasi pola aktivitas budaya sehari-hari, melalui peneguhan pelaksanaan pada tiga aspek lingkungan hidup yakni, lingkungan spiritual (*parhyangan*), lingkungan manusia (*pawongan*), dan lingkungan fisik (*palemahan*) (Gorda, 1996; Geriya, 2008; Parimarta, 2009).

Fenomena perubahan sosial budaya sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi yang melanda masyarakat Bali akhir-akhir ini, menimbulkan

keprihatinan berbagai elemen masyarakat di Bali. Berbagai elemen tersebut menilai, Bali tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, bahkan “ancaman”. Hal yang paling meresahkan adalah, adanya ketakutan akan terancamnya eksistensi ideologi *Tri Hita Karana*, berikut agama Hindu dan kebudayaan Bali. Globalisasi yang berintikan pada kapitalisme dan perdagangan bebas, diikuti oleh masuknya modal asing, telah membawa Bali terseret pada mekanisme jejaring ideologi pasar. Bali yang menurut istilah Nordholt (2005: xxix) adalah “benteng terbuka”, tidak kuasa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi, bahkan jerat ideologi pasar ini membawa Bali pada sebutan “*MacDonaldisasi of Bali*” atau “*Coca-Colanisasi of Bali*” (*Inside Indonesia*, Desember 1994; Atmadja, 2010). Sebutan ini merujuk pada maraknya perusahaan multinasional kelas dunia yang berkembang di Bali seperti: Coca Cola, Mc Donald, KFC, Pizza Hut, dan produk-produk lain yang sebagian besar berpusat di Amerika. Oleh karena itu, dalam istilah lain, Bali juga dapat dikatakan telah mengalami gejala “Amerikanisasi” atau “Westernisasi”.

Fenomena di atas memberi petunjuk, bahwa globalisasi dan modernisasi adalah sebuah persoalan besar yang berpotensi membuat segala sesuatunya berubah. Potensi terjadinya perubahan sosial budaya semakin menguat, sebagai akibat dari perkembangan pariwisata yang telah mengarah pada komodifikasi. Kemajuan dan perkembangan pariwisata juga memunculkan persoalan lain, yakni berkenaan dengan etnik pendatang. Burhanuddin (2009) dan Sukarma (2009) menunjukkan, kehadiran pendatang melahirkan konsep pemisahan dan pemilahan antara penduduk asli (pribumi) dan pendatang melalui kategorisasi berposisi

(*binary opposition*). Kondisi ini turut membentuk karakter orang Bali yang penuh dengan perasaan curiga, terlebih sikap itu dijustifikasi melalui simbol kultural.

Pada akhirnya, sikap tersebut memunculkan paham etnosentrisme. Pendatang, sebagaimana disebutkan Degung Santikarma (*Bali Post*, 2004) sering ditempatkan sebagai sumber masalah (*trouble makers*), yang tidak saja mengancam sumber nafkah mereka, tetapi juga ditempatkan sebagai ancaman terhadap identitas budaya mereka. Pendatang dianalogikan sebagai perusak identitas, karena ia datang dengan latar belakang adat, budaya, dan keyakinan yang berbeda; sedangkan penduduk asli (etnik Bali) adalah penjaga tradisi dan kemurnian identitas. Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa ancaman terhadap identitas enik Bali juga berasal dari etnik-etnik lain yang bermigrasi ke Bali.

Berbagai persoalan di atas dikhawatirkan dapat berdampak pada perubahan pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, dan budaya masyarakat Bali. Karakter budaya lokal luntur, dikalahkan budaya barat maupun budaya luar yang masuk ke Bali, dibawa oleh pendatang maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Apabila tidak segera diambil langkah-langkah penyelamatan, kondisi tersebut dapat mengganggu eksistensi ideologi *Tri Hita Karana* dan kekokohan agama Hindu.

Sebagai tanggapan atas kekhawatiran tersebut, berbagai kalangan masyarakat Bali memunculkan suatu wacana yang kemudian berkembang sebagai sebuah gerakan politik identitas yang bertujuan mengembalikan Bali pada identitasnya semula. Gerakan tersebut dikenal dengan gerakan *Ajeg Bali*. Kemunculan gerakan *Ajeg Bali* adalah jawaban terhadap dampak dari pencitraan atas Bali yang memiliki citra amat populer tidak saja pada tataran nasional, tetapi

juga pada tataran global, yakni: *pertama*, citra Bali yang turistik; *kedua*, citra Bali dengan identitas budaya yang tunggal dan homogen; dan *ketiga* adalah citra tentang Bali dengan *keajegan* budayanya. Dalam citra yang ketiga ini, Bali dibayangkan memiliki kultur dan tradisi yang senantiasa tegar (*ajeg*); citra budaya Bali yang tegar inilah yang tereproduksi sampai saat ini melalui ikon *Ajeg Bali* (Vikers, 1989; Picard, 1997; Dwipayana, 2005).

Menguatnya fenomena *Ajeg Bali* yang diiringi dengan penguatan identitas *kebalian* orang Bali, yang diikuti oleh munculnya sikap etnosentris, melahirkan faham *Baliisme*, dengan jargonnya “Bali adalah Hindu dan Hindu adalah Bali” (Burhanuddin, 2009: 127). Faham ini antara lain mengukuhkan prasangka etnik dan melahirkan sikap resistensi terhadap nilai-nilai luar yang masuk ke Bali. Dalam konteks ini, pendatang dari luar Bali yang non-Bali dan non-Hindu “tercurigai” sebagai ancaman. Kondisi ini semakin nyata terutama setelah peristiwa Bom Bali I dan II, yang meluluh-lantakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat Bali yang berbasis pada pariwisata. Kehancuran basis ekonomi ini berimplikasi luas dan kompleks pada komponen struktur sosial dan superstruktur ideologi masyarakat Bali. Pelaku bom Bali adalah orang luar Bali yang kebetulan beragama Islam. Fakta ini kemudian menimbulkan pemaknaan yang “hipergeneralisasi”, tercermin pada penyamaan bahwa Islam identik dengan kekerasan, dan bahkan identik dengan terorisme. Lebih jauh fakta ini juga mengganggu hubungan antara umat Hindu dan Islam di Bali yang secara historis sangat baik dan harmonis, tercermin dari penggunaan idiom “*Nyama Bali*”- “*Nyama Selam*”.

Pada akhirnya, *Ajeg Bali* menyerap seluruh wacana pengetahuan dan pemikiran di Bali, sehingga banyak kalangan mulai dari pejabat birokrasi, tokoh

adat, media massa, sampai akademisi memberi pengakuan dan persetujuan moral intelektual pada kata-kata ini. Mengacu pada gagasan para pakar yang mengkaji tentang *Ajeg Bali*, misalnya, Suryawan (2009), Sirtha (2005), Subagiasta (2005), Wiana (2005), Wibawa (2005), Titib (2005), Nordholt (2006), Atmadja (2010), dan lain-lain, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan *Ajeg Bali* pada dasarnya merupakan politik identitas yang bertumpu pada cita-cita mempertahankan kebudayaan Bali yang berbasis Agama Hindu. Gerakan ini merupakan resistensi terhadap kondisi kebudayaan Bali yang tidak lagi *ajeg* atau miring sebagai akibat dari adanya globalisasi. Kondisi ini harus dikembalikan agar kondisi yang tidak *ajeg* menjadi *ajeg*.

*Ajeg Bali* sebagai gerakan politik identitas telah memenuhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali baik sosial-religius, budaya, politik, ekonomi, bahkan pendidikan. Untuk itu diperlukan ruang gerak, wadah atau institusi sebagai media sosialisasi dan sarana implementasinya. Salah satu institusi yang paling penting dan menjadi basisnya adalah *desa pakraman* sebagai institusi sosial-kultural berlandaskan agama Hindu dan ideologi *Tri Hita Karana*. Sebagai kesatuan hukum masyarakat adat di Bali, *desa pakraman* mempunyai kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, yang diwujudkan dalam ikatan *Tri Kahyangan Desa* (tiga tempat suci/*parhyangan*), mempunyai wilayah, dan harta kekayaan sendiri, serta berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Th. 2001).

*Desa Pakraman Ubud* merupakan salah satu *desa pakraman* di Ubud, Gianyar, Bali yang menerapkan politik identitas gerakan *Ajeg Bali* sebagai upaya mempertahankan identitas etnik. Pemertahanan identitas etnik diperlukan, baik

dalam konteks menjaga kemurnian budaya Bali, agama Hindu, ideologi *Tri Hita Karana*, maupun dalam konteks menjaga identitas pariwisatanya yang bertumpu pada pariwisata budaya. Hal ini penting, mengingat kehidupan sosial ekonomi masyarakat *Desa Pakraman Ubud* sebagian besar bertumpu pada sektor pariwisata.

*Desa Pakraman Ubud* sebagai salah satu desa di Kawasan Pariwisata Ubud menampilkan gejala yang amat menarik. Jika banyak pengamat melihat bahwa pariwisata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi adalah faktor penting yang menyebabkan perubahan secara drastik pada sistem sosiobudaya masyarakat Bali, ternyata apa yang terjadi di *Desa Pakraman Ubud* menunjukkan gejala yang sebaliknya. *Desa Pakraman Ubud* tetap bisa mempertahankan kebudayaan Bali. Padahal dilihat dari Sejarah Keperiwisataan Bali, seperti dikemukakan Picard (2005) dan Atmadja (2009), pengenalan *Desa Pakraman Ubud* dan sekitarnya dengan pariwisata bukan hal yang baru. Kawasan ini mulai dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata (DTW) pada tahun 1920-an. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial yang amat intensif dan berlangsung secara terus-menerus antara wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal dengan masyarakat setempat. Bersamaan dengan itu Ubud tidak saja menjadi DTW yang sangat terkenal, tetapi juga sebagai daerah hunian wisata. Dengan adanya kenyataan ini tidak mengherankan jika Atmadja, Atmadja dan Widiastuti (2009) menyebut *Desa Pakraman Ubud* sebagai Kampung Global di Bali. Label ini berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa wisatawan yang berkunjung dan atau menetap di *Desa Pakraman Ubud* berasal dari berbagai negara. Selain wisatawan, banyak pula etnik pendatang dari luar Bali yang bekerja dan menetap di *Desa Pakraman Ubud*. Baik wisatawan maupun pendatang membawa budaya asli



mereka, sehingga *Desa Pakraman Ubud* sebagai Kampung Global, sekaligus juga berbudaya global.

Walaupun *Desa Pakraman Ubud* berkembang menjadi Kampung Global dan bercorak multikultur bahkan bisa pula disebut multietnik, namun warga *Desa Pakraman Ubud* masih tetap bisa mempertahankan identitas kebudayaannya, yakni kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali yang mereka kembangkan, memang tidak lagi bersifat tradisional, melainkan bercorak post-tradisional. Artinya, warga *Desa Pakraman Ubud* memang telah melewati masa kebudayaan tradisional, namun bukan meninggalkannya, melainkan membentuk suatu pola campuran yang harmonis antara kebudayaan tradisional Bali dan kebudayaan modern. Kondisi ini menarik dikaji, terutama berkaitan dengan latar belakang dan motif atau alasan maknawi yang menyebabkan mereka mempertahankan identitas kebudayaannya.

Dalam rangka menerapkan atau mengimplentasikan politik identitas gerakan *Ajeg Bali*, *Desa Pakraman Ubud* memerlukan media sebagai agen sosialisasi. Hal ini mengingat bahwa kebudayaan menyatu dengan masyarakat dan kebudayaan adalah milik masyarakat (Atmadja, 2010, 2011; Koentjaraningrat, 1982; Keesing (1992). Namun kesatuan antara masyarakat dan kebudayaan tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan proses pendidikan, yang di dalamnya melibatkan proses enkulturasi, sosialisasi, maupun ideologisasi. Pendidikan membutuhkan agen pendidikan atau agen sosialisasi. Untuk itu, masyarakat Bali termasuk juga masyarakat *Desa Pakraman Ubud* mengenal berbagai agen sosialisasi atau lembaga pendidikan tradisional yang lazim pula disebut simpul-simpul budaya Bali.

Agen sosialisasi tradisional tersebut di dalamnya mencakup *kuren* (keluarga batih), *dadia* (klen kecil patrilineal), *desa pakraman* (komunitas berbasis adat dan agama Hindu), *desa dinas* (desa administrasi), *subak* (organisasi pertanian) dan *sekaa* (pekumpulan sukarela atas dasar kepentingan) (Geertz dan Geertz, 1975; Atmadja, 1998, 2010b). Agen-agen sosialisasi ini memainkan peran penting dalam menjaga kelanggengan identitas etnik Bali melalui sistem pendidikan yang lazim disebut pendidikan informal.

Dengan masuknya modernisasi, maka selain mengenal agen sosialisasi tradisional, *Desa Pakraman* Ubud juga mengenal agen sosialisasi modern, yakni sekolah. Pengamatan kancha menunjukkan, bahwa di dalam wilayah *Desa Pakraman* Ubud, tidak saja ada Sekolah Dasar (SD), tetapi juga SMPN dan SMAN RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Berbagai jenjang lembaga pendidikan formal ini memainkan peran penting dalam mewujudkan pencapaian gerakan *Ajeg Bali*. Pada sekolah-sekolah ini dilembagakan kebudayaan Bali melalui apa yang disebut Pendidikan Kebudayaan Bali (PKB). PKB dituangkan dalam berbagai bentuk matapelajaran, yakni Agama Hindu, Bahasa Daerah, dan Muatan Lokal. Selain itu berbagai konsep maupun prinsip tentang kebudayaan Bali bisa pula diintegrasikan pada bidang-bidang studi yang relevan, misalnya Pendidikan IPS.

Agen pendidikan lain yang tidak kalah pentingnya adalah media massa, terutama Televisi (TV) dan Surat Kabar. Peran media massa sangat penting bagi pelestarian suatu kebudayaan. Dengan adanya kenyataan ini tidak mengherankan jika media massa, terutama TV sangat penting bagi pelestarian kebudayaan Bali. Gagasan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan, di mana pengamatan

kancah menunjukkan bahwa hampir semua keluarga yang berada pada kawasan *Desa Pakraman* Ubud pasti memiliki TV. Data ini menandakan bahwa peran media terutama TV sebagai agen pendidikan dalam konteks pemertahanan kebudayaan Bali tidak bisa diabaikan.

Agen-agen sosialisasi tersebut, baik secara terpisah maupun secara berkomplementer, dengan memakai metode pendidikan informal maupun metode pendidikan formal, sangat penting bagi pemertahanan kebudayaan Bali yang berkembang pada *Desa Pakraman* Ubud. Agen-agen pendidikan tersebut memiliki fungsi bagi komunitas, yakni apa yang disebut fungsi *latent*, yakni pemeliharaan pola yang tersembunyi yang terkait dengan masalah pemeliharaan nilai dan sistem. Nilai dan sistem yang dipelihara adalah nilai-nilai kebudayaan Bali yang memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat Bali. Pencapaian sasaran ini bukan aktivitas yang sekali jadi, melainkan terbentuk melalui suatu proses yang berkelanjutan.

Gerakan *Ajeng Bali* sebagai politik identitas yang berkembang pada masyarakat Bali, termasuk di *Desa Pakraman* Ubud, di satu sisi berdampak positif, yakni memperkuat identitas *kebalian* orang Bali. Namun di sisi yang lain bisa memunculkan etnosentrisme yang berlanjut pada kegiatan *me-liyan*-kan etnik lain sehingga kemunculan kekerasan, yakni kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan kultural acap kali tidak terhindarkan (Atmadja, 2010). Begitu pula Barker (2004) dan Munawar-Rachman (2010) menunjukkan bahwa politik identitas, apa pun labelnya, apakah berlabel budaya maupun agama, sangat rentan akan konflik yang berlanjut dengan kekerasan. Pendek kata, politik identitas di satu sisi bisa mengembangkan integrasi sosial di kalangan etnik Bali berdasarkan penguatan

identitas *kebalian* orang Bali, namun di sisi yang lain peluang bagi timbulnya konflik baik *konflik over* maupun *latent* yang disertai dengan kekerasan selalu terbuka adanya.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka implementasi politik identitas melalui gerakan *Ajeg Bali* dalam rangka keberlanjutan kebudayaan Bali di *Desa Pakraman Ubud* menarik dipertanyakan, sekaligus menjadi alasan penting yang melandasi penelitian ini. Hal ini tidak saja dilihat dari segi latar belakang atau alasan maknawinya (mengapa mereka melakukan pemertahanan identitas etnik melalui gerakan *Ajeg Bali*), tetapi juga tentang proses sosialisasi yang dilakukan oleh agen-agen pendidikan yang ada di kawasan *Desa Pakraman Ubud* (bagaimana proses sosialisasi, enkulturasi dan ideologisasi yang berlangsung pada agen-agen sosialisasi tradisional maupun modern atau informal maupun formal). Kedua pertanyaan ini penting mengingat bahwa keberlanjutan suatu sistem budaya tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui suatu proses atau tunduk pada asas prosesual berwujud sosialisasi, enkulturasi atau ideologisasi.

Berkenaan dengan kedua permasalahan di atas, maka pemertahanan identitas etnik Bali yang berlaku di *Desa Pakraman Ubud* juga penting dilihat dari segi implikasinya. Apakah gerakan politik identitas yang berkembang di *Desa Pakraman Ubud* hanya berimplikasi integratif dengan berlandaskan pada penguatan identitas *kebalian* atau sebaliknya, menimbulkan implikasi yang berdampak pada hubungan antaretnik di *Desa Pakraman Ubud*, mengingat *Desa Pakraman Ubud* tidak lagi bercorak monokultur, tetapi multikultur.

Mengacu pada paparan di atas, politik identitas gerakan *Ajeg Bali* sebagai konsep kearifan lokal pemertahanan identitas etnik yang dikaji dalam penelitian ini,

akan dilihat dari perspektif pendidikan. Dalam konteks ini, *Ajeng Bali* adalah proses pendidikan dan pembudayaan (enkulturasi), yang juga sangat relevan sebagai kajian pendidikan IPS, khususnya pendidikan IPS yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mengingat pendidikan IPS dapat dilihat dari dua kepentingan, yakni kepentingan yang didasarkan pada tujuan pendidikan formal sebagaimana dikembangkan dalam kurikulum pendidikan IPS di sekolah-sekolah, dan pendidikan IPS sebagai bentuk aplikasi dan memraksis dalam kehidupan sosial budaya masyarakat (Al Muchtar, 2001; 2002). *Ajeng Bali* sebagai kajian pendidikan IPS yang memraksis dalam kehidupan masyarakat juga sangat relevan dan penting untuk diakomodasi dalam kurikulum pendidikan IPS di persekolahan. Dalam konteks ini *Ajeng Bali* dapat digunakan sebagai sumber belajar IPS yang memberikan pengetahuan praktis kepada siswa tentang kehidupan sosial budaya yang berkembang di lingkungannya.

*Ajeng Bali* sebagai proses pendidikan IPS akan dikaji melalui pendekatan yang komprehensif, yakni pendekatan multidisipliner sebagaimana yang dikembangkan dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Cakupan multi disiplin ilmu dikembangkan oleh pendidikan IPS, yang berangkat dari konsep *Social Studies*. *Social Studies* dipancarkan pertama kali oleh Edgar Bruce Wesley pada tahun 1937, didefinisikan sebagai “...*the social studies are the social sciences simplified pedagogical purpose...social studies* adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan” (Barr, dalam Winataputra, 2001: 20). Pengertian ini kemudian dibakukan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Amerika, sebagai: “*The Social Studies Comprised of those aspects of: history, economic, political science, sociology, anthropology, psychology,*

*geography, and philosophy wich in practice are selected for purposes in schools and colleges...*” (Barr, dalam Winataputra, 2001: 20). Maksudnya, bahwa *social studies* berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi dan filsafat, yang dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi (Winataputra, 2001). Mengacu pada pemahaman tersebut, maka kajian tentang gerakan *Ajeg Bali* sebagai politik identitas pemertahanan identitas etnik, dapat dilihat dari perspektif pendidikan, sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, politik, bahkan agama.

Sebagai kajian ilmu, IPS menjadi salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan Nasional dan diajarkan mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Al Muchtar, 2001; Somantri, 2001). Berkenaan dengan itu, kajian tentang *Ajeg Bali* juga sangat relevan sebagai materi pilihan dalam pembelajaran IPS. Studi pendahuluan menunjukkan, gerakan *Ajeg Bali* dalam konteks sosial, budaya, kemasyarakatan, dan dalam konteks perubahan sosial, merupakan isu penting yang sangat relevan sebagai materi pembelajaran pendidikan IPS. Konteks ini berkaitan dengan masalah-masalah etnisitas, integrasi nasional, maupun nasionalisme.

Mengacu pada berbagai paparan di atas, maka penelitian tentang politik identitas gerakan *Ajeg Bali* ini sangat penting dilakukan, dan diharapkan menjadi masukan atau rekomendasi bagi pelaksana pendidikan IPS di berbagai jenjang sekolah, agar mulai memasukkan materi terkait isu-isu *Ajeg Bali* dalam kurikulum pendidikan sekolah mereka. Pendidikan IPS yang diberikan di sekolah-sekolah di Bali, dapat menguatkan mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu, Bahasa Daerah dan Muatan Lokal sebagai mata pelajaran inti yang bermuatan *Ajeg Bali*. Di sisi

lain, hal ini juga sangat memungkinkan, mengingat pendidikan IPS juga dapat dilihat sebagai suatu proses enkulturasi atau pembudayaan, baik itu pembudayaan nilai-nilai kemanusiaan, pembudayaan dalam konteks pewarisan budaya (*transmission of culture*), pembudayaan dalam konteks ideologi bangsa, pembentukan *nation character building*, maupun pembudayaan nilai-nilai pengetahuan yang terdapat dari disiplin ilmu bersangkutan (Cohen, 1971; Widja, 2002; Azra, 2002; Tillar, 2007; Suyanto, 2006). Pemahaman ini tidak terlepas dari pandangan filsafat ilmu seperti empirisme, positivisme, rasionalisme, dan idealisme, maupun filsafat ilmu pendidikan yang mendasari pendidikan IPS, seperti filsafat esensialisme, perenialisme, progresivisme, maupun rekonstruksionalisme (Ornstein dan Levine, 1985; Somantri, 2001).

Dalam implementasinya, pendidikan IPS sebagai sarana pendidikan kebudayaan Bali, dapat diwujudkan melalui kurikulum pendidikan IPS maupun kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal memungkinkan pendidikan IPS mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan isu-isu penting di daerah, sebagaimana dikemukakan Dakir (2004):

Dalam kurikulum muatan lokal, proses pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Begitu pula bahan yang ada pada muatan lokal dapat tercantum pada intrakurikuler, misalnya; berbagai mata pelajaran yang termasuk dalam bidang studi kesenian dan keterampilan, bahasa (bahasa daerah dan Inggris) dan beberapa topik atau subtopik pokok bahasan yang bernaung dalam bidang studi IPA dan IPS, dan pelajaran lainnya (Dakir, 2004: 108-109).

Berdasarkan definisi tersebut, melalui materi-materi pilihan yang relevan dengan konteks pemertahanan identitas etnik, maka Pendidikan IPS yang diberikan di sekolah-sekolah di Bali dapat mendukung strategi pendidikan kebudayaan Bali. Materi IPS yang disesuaikan dengan muatan lokal juga sangat dimungkinkan untuk

dilaksanakan, yakni dengan merujuk pada konten atau ruang lingkup materi ajar pendidikan IPS di sekolah menengah, yang menyangkut aspek-aspek: (1) Manusia, Tempat dan Lingkungan; (2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan; (3) Sistem Sosial dan Budaya; (4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan (Kurikulum Pendidikan IPS, 2006).

Paparan di atas menunjukkan, bahwa kajian tentang gerakan *Ajeng Bali* sangat penting, tidak saja karena masalah tersebut sangat aktual dan mendominasi berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali saat ini, tetapi juga dalam konteks pengembangan sumber belajar IPS, yakni dengan menggali masalah sosial-masyarakat sebagai sumber belajar IPS. Masalah penelitian ini juga menarik, tidak semata-mata dilihat dari akibat adanya penguatan identitas kesukubangsaan, tetapi terkait pula usaha mewujudkan cita-cita ideal bagi penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan IPS, antara lain mewujudkan manusia yang menjunjung tinggi asas multikulturalisme atau Bhineka Tunggal Ika.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian, yakni:

1. Mengapa masyarakat *Desa Pakraman Ubud* melakukan pemertahanan identitas etnik melalui politik identitas gerakan *Ajeng Bali* ?
2. Bagaimana pola penyelenggaraan pemertahanan identitas etnik melalui politik identitas gerakan *Ajeng Bali* di *Desa Pakraman Ubud*, baik yang berlangsung pada masyarakat sebagai agen sosialisasi tradisional, maupun pada sekolah sebagai agen sosialisasi modern ?



3. Bagaimana implikasi adanya pemertahanan identitas etnik melalui politik identitas gerakan *Ajeg Bali* terhadap hubungan antaretnik di *Desa Pakraman Ubud* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dipilah menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pemertahanan identitas etnik melalui politik identitas gerakan *Ajeg Bali* dan bagaimana hal itu berlangsung pada *Desa Pakraman Ubud* dengan melibatkan berbagai agen pendidikan, baik pendidikan informal melalui berbagai institusi tradisionalnya, maupun pendidikan formal yakni sekolah. Pemahaman ini penting, tidak saja guna memperkuat dan menambah pengetahuan ilmu sosial, tetapi bisa pula memberikan pengayaan, pengembangan atau bahkan sebagai sumber materi bagi pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Bahkan yang tidak kalah pentingnya, pemahaman teoretis yang didapat bisa pula berguna bagi pengembangan *Desa Pakraman Ubud* sebagai desa wisata yang mengglobal, tanpa kehilangan identitas *kebalian*-nya dan sekaligus terbebas dari konflik.

#### **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan di atas, yakni:

- (1) Mengungkapkan latar belakang munculnya upaya pemertahanan identitas etnik melalui politik identitas gerakan *Ajeg Bali* di *Desa Pakraman Ubud*.

- (2) Mengungkapkan pola penyelenggaraan pemertahanan identitas etnik melalui politik identitas gerakan *Ajeg Bali* di *Desa Pakraman Ubud*.
- (3) Menemukan implikasi atau dampak dari penerapan pemertahanan identitas etnik melalui politik identitas gerakan *Ajeg Bali* terhadap hubungan antaretnik di *Desa Pakraman Ubud*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat bermanfaat, baik secara teoritik maupun praktis yakni sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretik**

Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana *Desa Pakraman Ubud* mempertahankan citra dan identitasnya, baik identitas etnik yang melekat sebagai ciri khas institusi *desa pakraman*, maupun identitasnya sebagai kawasan pariwisata budaya. Hal ini penting, karena dengan demikian *Desa Pakraman Ubud* sekaligus mengemban dua misi sekaligus, yakni: *pertama*, sebagai sebuah desa adat/*desa pakraman* yang berada pada lingkup budaya dan Pemerintah Provinsi Bali, mempertahankan identitas etnik orang Bali adalah merupakan tugas dan kewajibannya, seperti juga *desa-desa pakaraman* lainnya. *Kedua*, mempertahankan identitas etnik berarti juga mempertahankan komoditas pariwisatanya yang bertumpu pada potensi adat, budaya, dan agama. Jika identitas ini pudar, maka pariwisata budaya yang menjadi andalan Ubud juga akan pudar.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Pendidikan IPS. Kajian penelitian yang

dikembangkan Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, selama ini masih didominasi oleh penelitian-penelitian yang berdimensi pendidikan dan pembelajaran IPS di sekolah-sekolah. Sementara itu kajian ilmu-ilmu sosial yang berbasis pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan di lapangan, seperti fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, jender, dan sebagainya masih jarang dilakukan.

Masalah ini juga sangat relevan dan dapat memperkaya studi Pendidikan IPS, baik dalam konteks kajian secara multi disipliner, maupun dalam rangka melahirkan rekomendasi penelitian, yakni dikembangkannya isu-isu etnisitas termasuk tentang *Ajeng Bali* dan isu-isu kearifan lokal lainnya dalam struktur materi IPS di sekolah-sekolah.

Secara khusus, manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- (1) Mengembangkan konsep tentang gerakan *Ajeng Bali* sebagai sebuah gerakan politik identitas.
- (2) Memberikan manfaat dalam rangka pengembangan konsep, proposisi, maupun teori baru dalam hubungan dengan konteks sosil-budaya masyarakat Bali.
- (3) Memberikan masukan kepada para pemikir, pengambil kebijakan dan peneliti lebih lanjut untuk mengembangkan penelitian berikutnya.
- (4) Memberi manfaat kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui Bali dari sisi yang lain.

## E. Klarifikasi Konsep

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah atau konsep yang memerlukan penjelasan atau pembatasan, yakni sebagai berikut:

### 1. *Ajeg Bali*

Istilah *Ajeg Bali* berasal dari dua kata, “*Ajeg*” dan “*Bali*”, yang secara harfiah kedua kata tersebut memiliki artinya masing-masing. Dalam Kamus Bali-Indonesia (1993: 9) kata: “*ajeg*” = *tegak, kukuh (peraturan)*; “*ajegan*” = tegakkan. Contoh penggunaan kata ini seperti: “*ajegang awig-awig desane*” (=tegakkan peraturan desa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 13), terdapat kata “*ajek*” yang memiliki arti yang sama, yakni: tetap; teratur; tidak berubah. Kata “*ajek*” merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Jawa, yang mempunyai makna yang sama dengan kata “*ajeg*”. Sedangkan kata “*Bali*” merujuk pada Pulau Bali atau Propinsi Bali yang secara hukum, geografis, dan politis merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian *Ajeg Bali* dapat diartikan sebagai “*meng-ajeg-kan Bali*” atau “*Bali yang ajeg*”. Merujuk pada arti kata “*ajeg*” tersebut maka Bali yang *ajeg*, berarti adalah, “*Bali yang kokoh, teratur, tegak, stagnan, mantap, tidak berubah*”.

Dalam konteks penelitian ini, *Ajeg Bali* dimaknai sebagai sebuah politik identitas atau gerakan pemertahanan identitas etnik Bali. Gerakan ini bertujuan mengembalikan masyarakat Bali dalam konteks pengamalan ajaran agama Hindu dan kebudayaan Bali, atau disebut pula sebagai *re-Baliisasi* dan *re-Hinduisasi*.

### 2. Politik Identitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 417) menunjukkan bahwa identitas mengandung beberapa arti, yakni; kesamaan; persamaan; jati diri; yang berarti pula

ciri khusus seseorang. Menurut Tilaar (2007: 16) identitas merupakan konsep yang sangat erat kaitannya dengan etnisitas. Identitas sering pula dikaitkan dengan stereotip-stereotip, baik yang positif maupun negatif dari suatu etnik.

Politik secara umum dapat diartikan sebagai “segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu negara; politik juga mengandung arti; cara bertindak dalam mengatasi atau menangani suatu masalah” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1995: 780).

Dari dua deskripsi tersebut, maka politik identitas sebagaimana dikemukakan Cressida Heyes (dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2007) dapat diartikan sebagai “tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan”. Politik identitas juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem politik yang dibangun berdasarkan perbedaan etnik di mana simbol-simbol kebudayaan masih digunakan sebagai ciri suatu kelompok. Jadi, politik identitas seperti dikatakan Barker (2003) dan Sarup (2008), terletak pada pandangan bahwa manusia dapat bertindak secara sengaja dan secara kreatif guna membentuk dan mempertahankan identitas etniknya.

### **3. Desa Pakraman**

Dalam sistem pemerintahan desa di Bali dikenal dua sistem pemerintahan, yakni desa dinas dan desa adat atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan *desa pakraman*. Kedua jenis desa tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. *Desa pakraman* mengatur masalah adat dan agama, sedangkan desa dinas

mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah desa di bawah kecamatan (Sirtha, 2008: 2).

Secara formal, istilah *desa pakraman* dimuat dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2001. Dalam Perda tersebut dijelaskan pengertian *desa pakraman*, yakni: "...kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Tri Kahyangan Desa* (Tiga Pura Pusat yang melandasi *desa pakraman* di Bali), yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri".

#### **4. Pariwisata**

Konteks penelitian ini tidak terlepas dari masalah pariwisata, sebagai *setting* latar *Desa Pakraman Ubud*, yang dikenal sebagai kawasan pariwisata budaya. Dalam Undang-Undang Kepariwisataan (Undang-Undang RI No. 10/2009), dijelaskan bahwa "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah". Sedangkan pengertian pariwisata budaya sebagaimana dikemukakan Yoeti (2006: 26) adalah jenis kegiatan pariwisata yang objeknya adalah kebudayaan. Objek daya tarik wisata budaya itu dapat berkisar pada beberapa hal, seperti: kesenian, baik seni rupa maupun segala bentuk seni pertunjukan, tata busana, tata boga, upacara adat, demonstrasi kekebalan dan komunikasi dengan alam gaib, lingkungan binaan, serta keterampilan-keterampilan khusus fungsional, seperti membuat kerajinan, dan lain-

lain. Objek tersebut tidak jarang dikemas khusus bagi penyajian untuk turis, dengan maksud agar lebih menarik.

## **5. Globalisasi**

Globalisasi antara lain dapat dijabarkan dari asal katanya yakni “global” , yang maknanya adalah universal. Pengertian dan pendefinisian globalisasi sangat luas, sehingga pemaknaannya tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya setempat (Brunsvick dan Danzin, 2007).

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disertasi disesuaikan dengan keluasan cakupan penelitian, di mana hasil dan pembahasan masing-masing permasalahan penelitian dipaparkan pada bab-bab tersendiri. Model sistematika seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pencermatan. Secara keseluruhan disertasi terdiri dari delapan bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

BAB II: Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran

BAB III: Metode Penelitian

BAB IV: Memaparkan gambaran umum lokasi penelitian

BAB V: Memaparkan pembahasan dari permasalahan penelitian pertama.

BAB VI: Memaparkan pembahasan dari permasalahan penelitian kedua.

BAB VII: Memaparkan pembahasan dari permasalahan ketiga

BAB VIII: Memaparkan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.